

TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI SISTEM ONLINE PAJAK RESTORAN BAGI WAJIB
PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**



Dosen Pembimbing

Drs. Riwayadi, MBA, Ak, CSRS, CPMA, CSRA
NIP. 196412281992071001

CHINTYA PERMATA SARI
1700542079

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Keuangan Negara dan Daerah dari Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas*

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN NEGARA

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

ABSTRAK

Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan. Pajak Daerah adalah iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda). Wewenang pemungutan pajak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pajak Daerah ini berlaku pada provinsi dan kabupaten atau kota. Pihak atau masyarakat yang melakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat langsung dari Pajak Daerah. Pengalokasian Pajak Daerah digunakan hanya untuk kepentingan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan lain-lain.

Sistem administrasi pajak yang berbasis teknologi informasi memudahkan bagi pelayanan dan pengawasan untuk mengawasi wajib pajak dan petugas pajak dengan optimal agar tidak terjadinya kecurangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan menimbulkan kepercayaan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.